



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kinerja Organisasi Daerah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Indikator Kinerja Utama SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. Indikator Kinerja Utama SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan Indikator Kinerja Utama selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 87

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 87 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN 2014-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Capaian Penilaian LKIP	Seluruh SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Nilai LAKIP
		Capaian penilaian LPPD	Seluruh SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Nilai LPPD
		Capaian penilaian opini BPK	Seluruh SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Nilai LHP
		jumlah SKPD yang menyusun capaian kinerja	Seluruh SKPD	LAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP dan melaporkannya ke Kepala Daerah
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Penerapan Insentif berbasis kinerja	Seluruh SKPD	Data base Kepegawaian	Perbup TPP Berbasis Kinerja
		Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam satu tahun	Seluruh SKPD	Data base Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah PNS yang tidak hadir di dalam sistem} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh PNS}}$
		Presentase PNS yang mendapat Hukuman disiplin	Seluruh SKPD	Data base Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh PNS}}$
		Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Seluruh SKPD	Data base Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindak lanjuti} \times 100 \%}{\text{Jumlah temuan eksternal dalam satu tahun}}$
		Presentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	Seluruh SKPD	Data base Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah PNS yang berpendidikan Sesuai tugas dan fungsi} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh PNS yang ada}}$
		SKPD yang memiliki Indikator Kinerja	Seluruh SKPD	Laporan SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Sekretariat Daerah	SKPD yang melaksanakan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai RPJMD 2014 – 2018
		Penerapan SPM/SP	Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	Presentase SKPD yang telah menerapkan SPM sesuai dengan Target RPJMD 20154 – 2018
		Penerapan SMM/SNI/ISO 9001 - 2008	Sekretariat Daerah	SKPD yang melaksanakan pelayanan publik	Presentase penerapan SMM/SNI/ISO sesuai dengan target Kinerja RPJMD 2014 – 2018
4	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel	Presentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase muatan Renstra/RPJMD
		Presentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Muatan RKPD/RPJMD
		Presentase kesesuaian perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan turunannya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase perencanaan pembangunan daerah/Rencana Tata Ruang Wilayah
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Interval tangga Arstein

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Capaian Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Capaian angka indeks Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani
		Angka Partisipasi Murni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun
		Angka Partisipasi Kasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Perbandingan Jumlah siswa padatingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri atau swasta dengan mendapat surat tanda tamat belajar
7.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Capaian penilaian angka Indeks Kesehatan
		Rasio Posyandu per satuan Balita	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Posyandu} \times 1000}{\text{Jumlah Balita}}$
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas/poliklinik/Pustu} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}}$
		Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}}$
		Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dokter} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}}$
		Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Medis} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}}$
		Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada pola mortalitas menurut umur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
8.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan di masyarakat	Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama/keyakinan	- Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah insiden yang disebabkan oleh masalah perbedaan Agama/keyakinan dalam satu tahun
9.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Panjang jalan kewenangan Kabupaten Sumedang dalam kondisi baik
		Status jalan Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Panjang jalan status jalan Kabupaten Sumedang
		Cakupan daerah irigasi terhadap area pertanian	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya
		Proporsi Rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan .	- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air - Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Proporsi jumlah penduduk yang menndapat akses air bersih terhadap jumlah penduduk di nperkotaan dann perdesaan
		Cakupan layanan rumah tidak layak huni	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Cakupan layanan rumah tidak layak huni
10.	Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Kawasan pengembangan ekonomi baru	- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Pembangunan infrtastruktur di kawasan ekonomi baru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
11.	Meingkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang	Tingkat Investasi (PMTB)	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Investasi berskala nasional
		Kluster industri mikro kecil	Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kluster industri mikro dan kecil
		Kluster industri menengah	Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kluster Industri menengah
		Jumlah Usaha Mikro dan menengah	Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah
		Pelatihan kerja	Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penduduk usia produktif yang telah diberi pelatihan kerja
		Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penduduk yang telah diberi kesempatan kerja selama satu tahun
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam satu tahun
		Pengawasan tenaga kerja	Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Pengawasan tenaga kerja yang dilaksanakan dalam satu tahun
		Perlindungan tenaga kerja	Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tenaga kerja yang telah diberi perlindungan kerja
		Kawasan strategis Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kawasan strategis Kabupaten Sumedang
Jumlah obyek wisata daerah yang dikembangkan	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan dalam satu tahun		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
12.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Kredit perbankan kepada KUKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kredit perbankan yang telah disalurkan kepada KUKM dalam satu tahun
		Indeks Gini	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$G = 1 - \sum_{i=1}^k p_i (F_{ci} - F_{ci-1})$ <p>Dimana :</p> <p>f_{pi} = frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i</p> <p>F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada pendapatan ke i</p> <p>K = banyak kelas</p> <p>F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i</p>
		Capaian Indeks Daya Beli Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Capaian angka Indeks Daya Beli Masyarakat
		PDRB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$
13.	Meningkatnya ketahanan pangan	Presentase kebutuhan ketahanan pangan yang dapat dipenuhi oleh produksi pertaniann daerah	- Dinas pertanian, Peternakan, dan Perikanan - Kantor Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Prosentase kebutuhan pangan daerah yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah
		Presentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan	- Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan - Kantor Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Prosentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
14	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Rasio Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Badan Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<u>Luas Hutan lindung</u> Luasa total Hutan
		Rasio Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	Dinas Ciptakarya,Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<u>Luas Ruang terbuka hijau</u> Luas wilayah ber HPL/HGB
		Rasio Lahan kritis terhadap total luas wilayah	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<u>Luas lahan kritis</u> Luas total wilayah
		Presentase penanganan sampah	Badan Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<u>Jumlah sampah yang dapat ditangani</u> Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk
		Presentase luas permukiman yang tertata	Dinas Ciptakarya,Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Perbandingan luas permukiman yang tertata dengan luas pemukiman secara keseluruhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
15.	Lestarinya nilai-nilai Kesundaann	Jumlah grup kesenian aktif	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah grup kesenian yang masih aktif
		Jumlah Gedung Kesenian	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Gedung kesenian yang ada
		Jumlah Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah perpustakaan
		Jumlah pengunjung perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun
		Penggunaan bahasa sunda dalam proses belajar dan pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Prosentase penggunaan bahasa sunda dalam proses mengajar dan kegiatan pemerintahan
		Jumlah pengunjung museum	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah pengunjung museum per bulan

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2014-2018

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA ... (nama SKPD) KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: 201/KEP. .../.../...

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN ... (nama SKPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...-...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ... (nama SKPD) KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun 201.. tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun ...-... di Lingkungan ... (nama SKPD) Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ... (nama SKPD) TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ... (nama SKPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...-....

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan ... (nama SKPD) Kabupaten Sumedang Tahun ...-..., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh ... (nama SKPD) Kabupaten Sumedang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis ... (nama SKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA ... (nama SKPD)
KABUPATEN SUMEDANG,

nama lengkap tanpa gelar, pangkat,
golongan, dan nomor induk pegawai

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA ... (nama SKPD) KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR: 201/KEP. .../.../...
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ... (nama SKPD)
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...-...

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ... (nama SKPD)
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN...-...

Nama SKPD :.....
 Tugas :.....
 Fungsi : 1.....
 2.....
 3. dst

NO.	SASARAN STRATEGIS								Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu								

KEPALA ... (nama SKPD)
 KABUPATEN SUMEDANG,

nama lengkap tanpa gelar, pangkat,
 golongan, dan nomor induk pegawai

BUPATI SUMEDANG
 WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN